

RINGKASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet menjadi landasan hukum terhadap usaha warung internet di seluruh Kabupaten Cilacap khususnya di Kecamatan Cilacap Utara. Namun dalam pelaksanaannya masih sering kali ditemui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di warung internet sehingga implementasi peraturan daerah tentang pembinaan dan pengelolaan warung internet terkesan masih belum optimal. Maka dari itu perlu dikaji lebih lanjut implementasi kebijakan pembinaan dan pengelolaan warung internet di Kecamatan Cilacap Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan dan pengelolaan warung internet di Kecamatan Cilacap Utara. Model perspektif implementasi yang digunakan adalah model perspektif *top-down* yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Model implementasi Edwards III menyebutkan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yakni meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive* sebagai teknik pemilihan informan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif Milles, Huberman dan Saldana dengan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.

Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet di Kecamatan Cilacap Utara belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi dalam implementasi peraturan daerah pembinaan dan pengelolaan warung internet di Kecamatan Cilacap Utara yang masih kurang maksimal. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki serta tidak tersedianya sumberdaya berupa anggaran finansial. Kemudian disposisi atau sikap yang ditunjukkan staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih rendah. Serta tidak adanya SOP sebagai aturan pelaksanaan yang jelas.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet

SUMMARY

Cilacap Regency Regulation Number 1 Of 2014 about Development and Management of Internet Cafes become the legal basis of the business of internet cafes around the Cilacap regency, especially in the District of North Cilacap. However, in practice they often encountered violations that occurred in internet cafes so that the implementation of local regulations on development and management of internet cafes impressed still not optimal. Therefore need studied further policy implementation of development and management of internet cafes in the District of North Cilacap.

The purpose of this research is to describe the policy implementation of development and management of internet cafes in the District of North Cilacap. The model used is an implementation perspective model of top-down perspective advanced by George C. Edwards III. Model implementation Edwards III said there are four variables that influence the success or failure of policy implementation, which include communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The method used is descriptive qualitative method with purposive technique informant election. The data collection is done by in-depth interviews, observation and documentation. The analytical method used is an interactive model Milles, Huberman and Saldana with data validity was tested by triangulation.

Based on the analysis of the results showed that the implementation of Cilacap Regency Regulation Number 1 Of 2014 about Development and Management of Internet Cafes in the District of North Cilacap are not optimal. It is influenced by several factors, communication in the implementation of local regulations for promoting and managing internet cafes in the District of North Cilacap is still less than maximum. The limited resources they have and also non-availability of resources in the form of financial budget. Then dispositions or attitudes shown by staff Department of Communication, Information and Technology, the operator of the local regulations for promoting and managing internet cafes are still low. Then the bureaucratic structures at the department still not maximal to the unavailability of SOP as advanced rules of development and management of local regulations of the internet cafes clarity.

Keywords: Policy Implementation, Development and Management Internet Cafes